

Analisis Efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP)

Nadiya Agustiana Dewi¹, Indra Cahya Kusuma², Mas Nur Mukmin³

^{1,2,3} Akuntansi, Universitas Djuanda Bogor

e-mail: Nadiyagustianad@gmail.com¹, indra.cahya.k@unida.ac.id²,
mas.nur.mukmin@unida.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah efektif dan sudah memenuhi target atau belum di Pelabuhan Ratu. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif. Pengumpulan data dibagi menjadi dua ada yang primer berupa wawancara terstruktur dan data sekunder berupa menelaah dokumen yang ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan hasil penelitian, tahun 2017 berada pada tingkatan yang sangat efektif, pada tahun 2018 tingkat efektifitas menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 tingkat efektifitas adanya penurunan yaitu dibawah 100%. 2). Pada tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat target atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi ditahun 2017 terdapat realisasinya karena ada kapal jenis tersebut yang memasuki area kolam pelabuhan sehingga harus adanya pemungutan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di tahun 2019 ditetapkan target pertahunnya oleh Pemerintah Pusat, tetapi pada tahun ini ternyata tidak terdapat kapal jenis tersebut yang memasuki area kolam sehingga tidak terdapat realisasinya.

Kata Kunci : *Efektif, Target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Abstract

This research to analyze State income is not tax is already effective and has met the target or block in the Queen's Port. The method used in research is descriptive analysis. The data collection is divided into two primary forms of structured interviews and secondary form of scanning existing documents. The results of the study show that (1) Based on the results of research, 2017 was at a very effective level, in 2018 the rate of effectiveness decreased when compared to the previous year. Then in 2019 the level of efficacy was decreasing that is below 100%. 2). In 2017 and 2018 there was no target for State income is not tax, but in 2017 there was realisation because there were such ships entering the port pool area so there must be a filing of realization of State income is not tax. In 2019 the annual target was set by the Central Government, but in this year it turned out that there were no such vessels that entered the pool area and there is no realisation.

Keywords: *Effective, Target, And State Income Is Not Tax.*

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak karena ini berasal dari dana masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu pada pasal 11 ayat 3, pendapatan negara Indonesia bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penelitian mengenai penerimaan negara bukan pajak dilakukan oleh Budi dan Handayani (2019) menunjukkan hasil bahwa PP No. 12 Tahun 2014 menjadi alat pengendalian internal terhadap PNBP dan keakuratan pencatatan PNBP di kehutanan, untuk kepatuhan pengelolaan PNBP di TNBB didasarkan pada PP No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

Sehingga menyebabkan PNBP yang diterima oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu bermasalah karena target PNBP yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada

tahun 2019 tidak dapat terlampaui, dan apabila terlampaui pun tidak begitu pesat dari target PNBPN yang ditentukan pemerintah. Sehingga menyebabkan setoran PNBPN kepada Negara pada tahun 2019 tidak sesuai dengan target tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Target PNBPN tahun 2017 sampai 2019 sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran PNBPN Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Target PNBPN	Realisasi PNBPN
2017	586.292.795	602.230.455
2018	645.322.500	655.852.463
2019	661.123.670	619.693.365

Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2019.

Menurut hasil penelitian Budi dan Handayani (2019), Hastuti (2018) mengemukakan bahwa dengan acuan Peraturan Pemerintah maka keakuratan pencatatan PNBPN akan lebih dan efektif. Sharma (2015), dengan judul "Analisis Daya Apung Pendapatan Bukan Pajak di India" Penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi eksponensial pendapatan. Objek penelitian Pemerintahan India. Koefisien apung merupakan indikator untuk mengukur respon total penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) terhadap perubahan pendapatan pengaruh perubahan inflasi dimasukkan dalam perhitungan daya apung. Koefisien apung dari total penerimaan PNBPN menunjukkan 0,48 dalam hal ini nilai apung PNBPN lebih kecil dari satu yang menunjukkan bahwa PNBPN merupakan sumber daya penghasil pendapatan yang tidak signifikan.

Dari uraian diatas mengenai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan analisis efektivitas yang artinya perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja yang digunakan untuk menentukan seberapa besar penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, ada juga yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang sedang saya teliti merupakan menganalisa studi kasus atau permasalahan yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang terdapat pada objek yang diteliti, jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) yang diteliti, dan metode yang diteliti. Dan masih ada Peraturan Pemerintah yang belum bisa dijalankan dan diterapkan seperti penelitian Budi dan Handayani (2019) dan itu merupakan permasalahan yang sama dengan kantor yang sedang saya teliti tidak semua tarif yang ada dalam peraturan pemerintah dapat dijalankan karena terdapat beberapa kendala yang memang tidak bisa dijalankan sehingga mempengaruhi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan disetorkan kepada Kas Negara.

Permasalahan yang terjadi mengenai PNBPN yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah penerimaan dari hasil sewa lapak, seperti pelayanan yang tidak dapat lagi diberikan dan kerusakan pada beberapa fasilitas penunjang layanan, sehingga beberapa layanan tidak dapat dioptimalkan dalam teknis pelaksanaannya, Dan karena keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh kementerian kelautan dan perikanan, tidak semua data tarif yang berlaku dapat diambil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Maka ditarik kesimpulan untuk permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah kali ini yang nantinya akan menjadi sebuah penyelesaian dalam permasalahan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sudah efektif pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sudah memenuhi target. Dalam penelitian memiliki tujuan tersendiri yang ingin diketahui oleh peneliti, ada beberapa tujuan yang ingin peneliti ketahui diantaranya untuk mengetahui apakah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sudah efektif, dan untuk mengetahui apakah Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah memenuhi target.

METODE

Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur menurut Esterberg, dalam Sugiyono (2012:233) Peneliti telah membuat instrumen penelitian, yaitu pertanyaan tertulis, dengan jawaban alternatif yang telah disiapkan, karena mereka sudah tahu apa yang akan mereka pelajari.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk menggambarkan dan menunjukkan makna dari data yang dikumpulkan dengan memperhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis untuk memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang hasilnya lebih menekankan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan bersifat fakta sebenarnya.

Menghitung persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dan potensi PNBP untuk kegiatan yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100 \%}{\text{Potensi Penerimaan}}$$

Sumber: Halim, (2004:164)

Untuk mengukur efektif atau tidaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tiga tahun tersebut di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, maka digunakan stndarisasi yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran Ketepatan (%)	Kriteria Keefektifan
≤ 60%	Tidak efektif
> 60% – 80%	Cukup efektif
> 80% – 100%	Efektif
> 100%	Sangat efektif

Sumber: Yuliyanti, 2014.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, untuk mengetahui apakah efektif atau tidak: hasil yang menunjukkan persentase yang lebih tinggi menunjukkan tingkat efektif, sedangkan persentase yang lebih rendah menunjukkan tingkat tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keefektifan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Target dan realisasi PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dihitung persentase perbandingan antara realisasi dan target PNBP untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagai berikut:

Tabel 3 Laporan Realisasi, Target dan Efektifitas PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2017, 2018, 2019

Uraian	2017	2018	2019
Total realisasi	602.230.455	655.852.463	619.693.365
Target	586.292.795	645.322.500	661.123.670
Selisih	15.937.660	10.529.963	(41.430.305)
Keefektifan %	102,71	101.63	93.73

Sumber: Data diolah, 2019

Dapat dihitung persentase perbandingan antara Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2017 – 2019 seperti berikut:

$$\text{Efektifitas (2017)} = \frac{\text{Rp. } 602.230.455 \times 100\%}{\text{Rp. } 586.292.795} = \mathbf{102,71 \%}$$

$$\text{Efektifitas (2018)} = \frac{\text{Rp. 655.852.465} \times 100\%}{\text{Rp. 645.322.500}} = \mathbf{101,63\%}$$
$$\text{Efektifitas (2019)} = \frac{\text{Rp. 619.693.365} \times 100\%}{\text{Rp. 661.123.670}} = \mathbf{93,73\%}$$

Untuk mengukur efektif atau tidaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk tiga tahun tersebut di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, maka digunakan standarisasi yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh berada diantara $< 60\%$ = tidak efektif
2. Hasil yang diperoleh berada diantara $> 60\% - 80\%$ = cukup efektif
3. Hasil yang diperoleh berada diantara $> 80\% - 100\%$ = efektif
4. Hasil yang diperoleh berada diantara $> 100\%$ = sangat efektif

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2017 tingkat keefektifannya sebesar 102,71%, dan ditahun 2018 tingkat keefektifan sebesar 101.63%, kemudian di tahun 2019 tingkat keefektifan sebesar 93,73%. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa pada setiap tahunnya terjadi penurunan tingkat keefektifan tetapi pada tahun 2017 – 2018 persentase masih diatas 100% dan itu menyatakan bahwa tingkat keefektifan sangat efektif, tetapi pada tahun 2019 ini penurunan persentase berada di bawah 100% walaupun persentasenya menurun tetapi masih terbilang efektif. Dapat disimpulkan dari ketiga tahun tersebut efektifitas PNBP di PPN Palabuhanratu terbilang efektif.

Analisis Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena sudah merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dengan perkiraan sekitar 0-5% setiap tahunnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima kemudian akan diserahkan kepada Kas Negara melalui aplikasi SIMPONI untuk pembuatan *Billing* yang nantinya akan di setorkan kepada Kas Negara. Jenis PNBP berupa layanan jasa sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh pihak instansi kepada nelayan yang nantinya akan disetorkan kepada kas negara sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Dalam kasus ini, memberikan kontribusi kepada masyarakat yang menerima pelayanan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan daripada menghasilkan keuntungan.

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh bendahara penerima Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ke Kasa Negara dilakukan setiap hari melalui Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yang biasa disebut dengan *Billing*, setelah bendahara penerima membuat pembayaran, kemudian bendahara penerima menyetorkan uang ke bank. Setelah menyetorkan uang ke bank, bendahara penerima menerima tanda bukti setor atau struk dari Bank yang sudah terdapat nomor NTPN bahwa sudah melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara serta menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan kemudian di legalisir yang nantinya bukti setor itu akan dikirimkan oleh pihak bendahara penerima ke akun dan email Simponi, sementara dalam kasus pelaporan realisasi PNBP, pihak bendahara penerima Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melaporkannya setiap hari karena terdapat beberapa penerimaan PNBP yang dihasilkan setiap harinya maka di setorkan kepada Kas Negara setiap hari tetapi ada juga penerimaan PNBP yang dihasilkan sebulan sekali atau setahun sekali sesuai dengan jenis PNBP yang diterima.

Adapun penetapan persentase maupun jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ditentukan dengan aturan Pemerintah Pusat dimana dana PNBP dapat dicairkan kembali kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan persentase sebesar 70% - 80% dari penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kas Negara, dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat tetap di cairkan walaupun pada tahun itu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mencapai target dengan persentase sebesar 70% - 80% dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

sudah disetorkan kepada Kas Negara. Dalam hal ini, sebagian besar dana PNBP yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang terkait dengan jenis PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan pelayanan penerimaan PNBP itu sendiri akan didukung oleh dana yang dapat dicairkan.

Pembahasan

Keefektifan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu PPNP)

Tabel 3 Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2017

No	MAP	Uraian	Target PNBP (RP)	Realisasi PNBP (RP)
1	423218	Jasa tambat > 30 GT	5.184.000	534.711
2	423218	Jasa labuh > 30 GT	51.840.000	27.769.088
3	423218	Jasa tambat labuh 5-10 GT	2.400.000	2.822.000
4	423218	Jasa tambat labuh 15-20 GT	648.000	12.000
5	423218	Jas atambat labuh 25-30 GT	5.184.000	3.008.000
6	423218	Jasatambatkapal non perikanan	648.000	7.619.250
7	423218	Jasalabuhkapal non perikanan	-	19.397.750
8	423218	Jasatambatlabuhkapal diatas batas 30 etmal	-	37.230.000
9	423291	Jasa pengadaan es curah	-	11.420.000
11	423291	Jasapengadaanairdari sumber sendiri	111.600.00 0	-
12	423291	Jasa cool room	60.000.000	41.425.000
13	423291	Jasa pembekuan (freezer)	58.800.000	-
14	423291	Jasa forklift	9.000.000	9.600.000
15	423291	Jasa truck crane	33.000.000	23.550.000
16	423291	Jasa mobil tangki air/dump truck	5.250.000	16.575.000
17	423291	Jasa kendaraan berpendingin	7.200.000	4.200.000
18	423291	Jasa tangki BBM & instalasi	25.000.000	195.000
19	423291	jasa tangki air & instalasi	-	11.006.000
20	423291	Jasa tpt perbaikan kapal kerusakan ringan	4.000.000	285.000
21	423291	Jasa tpt perbaikan kapal kerusakan sedang	-	225.000
22	423291	Jasa tpt perbaikan kapal kerusakan berat	-	657.000
23	423291	Jasa pekerjaan ringan	8.000.000	16.260.000
24	423291	Jasa pekerjaan sedang	9.990.000	17.160.000
25	423291	Jasa pekerjaan berat	12.950.000	27.850.000
26	423291	Jasa penggunaan tanah	4.488.000	8.106.000
27	423291	Jasa pemeliharaan tanah/prasarana	1.022.500	8.252.500
28	423291	Jasa bangunan semi permanen	17.437.500	4.061.250
29	423291	Jasa bangunan permanen	13.700.000	23.950.000
30	423291	Tpt penump brg ruang terbuka beratap	1.010.000	73.710.000
31	423291	Tpt penump brg ruang terbuka tidak beratap	4.500.000	17.610.000
32	423291	Pas masuk motor	9.000.000	9.792.000
33	423291	Pas masuk mobil	7.000.000	11.844.000
34	423291	Pas masuk truck/bus	5.000.000	5.650.000
35	423291	Jasa kebersihan bangunan permanen	14.818.400	2.638.200
36	423291	Jasa kebersihan pertokoan /perkantoran	744.000	12.431.600
37	423291	Jasa kebersihan warung/kios	3.000.000	2.079.600
38	423291	Jasa truck/truck tangki bongkar muat	480.000	-
39	423291	Jasa pick up bongkar muat	125.000	-
40	423291	Jasa kebersihan kolam kapal >30 GT	2.073.600	6.527.466

41	423291	Jasa kebersihan kolam kapal non perikanan	2.100.000	10.473.750
42	423291	Jasa mess ac	4.400.000	8.200.000
43	423291	Jasa ruang rapat ac	3.000.000	10.500.000
44	423291	Pelayanan listrik	81.699.795	107.603.290
Jumlah			586.292.795	602.230.455

Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2017.

Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2017 tingkat efektifnya sebesar 102,71% karena realisasi penerimaannya pun dapat melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pada tahun 2017 ini terdapat beberapa jenis tarif penerimaan PNBP yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang tidak melampaui target tetapi tidak begitu banyak hanya terdapat beberapa jenis tarif PNBP yang tidak dapat melampaui targetnya, terdapat pula beberapa tarif PNBP yang tidak dapat terealisasi seperti jasa truk tangka bongkar muat, jasa *pick up* bongkar muat, dan jasa pengadaan air mineral yang ditargetkan dengan sangat tinggi sebesar Rp. 111.600.000 tidak dapat direalisasikan karena di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tidak terdapat fasilitasnya sedangkan pemerintah menargetkan dengan nilai yang cukup tinggi, tetapi pada tahun 2017 ini juga terdapat tarif penerimaan PNBP yang sangat tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 73.710.000 dan tarif penerimaan yang ditentukan sebesar Rp. 1.010.000 yang dihasilkan dari jenis PNBP tempat penumpukan barang ruang terbuka beratap.

Tabel 1 Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2018

No	MAP	Uraian	Target PNBP (RP)	Realisasi PNBP (RP)
1	425621	Jasa tambat > 30 GT	5.184.500	424.915
2	425621	Jasa labuh > 30 GT	51.840.000	27.521.724
3	425621	Jasa tambat labuh 5-10 GT	2.400.000	3.666.000
4	425621	Jasa tambat labuh 10-15 GT	-	535.000
5	425621	Jasa tambat labuh 15-20 GT	-	30.000
6	425621	Jasa tambat labuh 20-25 GT	756.000	829.500
7	425621	Jasa tambat labuh 25-30 GT	10.000.000	16.321.000
8	425621	Jasatambatkapal non perikanan	15.000.000	2.076.000
9	425621	Jasalabuhkapal non perikanan	15.000.000	9.505.000
10	425621	Jasa kapal (floting repar)	6.603.000	-
11	425621	Jasatambatlabuhkapal diatas batas 30 etmal	-	13.816.000
12	425621	Jasa cool room	30.000.000	33.908.400
13	425621	Jasa pengadaan es	-	1.155.000
14	425621	Jasa pembekuan (freezer)	25.000.000	-
15	425151	Jasa forklift	10.000.000	10.500.000
16	425151	Jasa truck crane	34.950.000	23.100.000
17	425151	Jasa mobil dump truck	5.250.000	-
18	425151	Jasa mobil tangki air	37.875.000	21.975.000
19	425151	Jasa kendaraan berpendingin	15.000.000	1.200.000
20	425151	Jasa tangki BBM & instalasi	10.500.000	2.632.500
21	425151	jasa tangki air & instalasi	25.000.000	3.067.000
22	425151	Jasa tpt perbaikan kapal kerusakan ringan	2.500.000	1.077.000
23	425151	Jasa pekerjaan ringan	13.500.000	13.960.000
24	425151	Jasa pekerjaan sedang	19.980.000	20.220.000
25	425151	Jasa pekerjaan berat	40.000.000	31.100.000
26	425151	Jasa penggunaan tanah	4.500.000	858.000
27	425151	Jasa pemeliharaan tanah/ prasarana	1.022.500	8.861.925
28	425151	Jasa bangunan semi permanen	3.495.000	-

29	425151	Jasa bangunan permanen	15.000.000	13.167.000
30	425151	Tpt penump brg ruang terbuka beratap	30.000.000	89.560.500
31	425151	Tpt penump brg ruang terbuka tidak beratap	10.700.000	24.525.000
32	425151	Jasa mess ac	5.280.000	5.280.000
33	425151	Jasa ruang rapat ac	3.000.000	3.000.000
34	425621	Pas masuk motor	14.335.500	15.353.000
35	425621	Pas masuk mobil	10.000.000	11.021.000
36	425621	Pas masuk truck/bus	15.000.000	7.631.000
37	425621	Jasa kebersihan bangunan permanen	15.000.000	10.408.600
38	425621	Jasa kebersihan warung/kios	12.450.000	6.872.433
39	425621	Jasa tempat pengepakan ikan	-	210.000
40	425621	Jasa kebersihan kolam kapal >30 GT	2.601.000	6.872.433
41	425621	Jasa kebersihan kolam kapal non perikanan	7.000.000	5.042.500
42	425699	Pelayanan listrik	119.600.000	214.190.466
		Jumlah	645.322.500	655.852.463

Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2018.

Pada tahun 2018 tingkat realisasi penerimaannya terhitung meningkat dari tahun 2017 tetapi tingkat keefektifannya menurun dari 102,71% menjadi 101.63% dikarenakan pada setiap tahunnya target penerimaan selalu meningkat sebesar 2% – 5% dan realisasi penerimaan pun meningkat karena pada tahun 2018 terdapat beberapa jenis PNBP dengan realisasi yang tidak dapat mencapai target penerimaan, tetapi terdapat juga beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di targetkan tetapi tidak dapat terealisasi penerimaannya seperti jasa kapal (*floating repar*) yang tidak dapat direalisasikan karena fasilitas pendukungnya tidak tersedia di instansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, jasa pembekuan (*freezer*) yang pada tahun ini juga tidak dapat terealisasi dikarenakan mesin *freezer* yang ada di kastorit rusak sehingga tidak dapat beroperasi, kerusakan mesin pembeku tidak hanya terjadi pada tahun 2018 saja tetapi pada tahun 2017 pun terjadi kerusakan sehingga tidak ada realisasi penerimaannya pada 2 tahun terakhir ini, jasa bangunan semi permanen, dan jasa bangunan permanen yang memang pada tahun ini terdapat beberapa kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3 Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2019

No	MAP	Uraian	Target PNBP (RP)	Realisasi PNBP (RP)
1	425621	Jasa tambat > 30 GT	5.288.190	3.400.705
2	425621	Jasa labuh > 30 GT	52.876.800	51.537.756
3	425621	Jasa tambat labuh 5-10 GT	2.448.000	4.668.000
4	425621	Jasa tambat labuh 10-15 GT	-	32.000
5	425621	Jasa tambat labuh 15-20 GT	-	777.000
6	425621	Jasa tambat labuh 20-25 GT	771.120	259.000
7	425621	Jasa tambat labuh 25-30 GT	10.200.000	1.064.000
8	425621	Jasa tambat kapal non perikanan	15.300.000	2.700.000
9	425621	Jasa labuh kapal non perikanan	15.300.000	7.525.000
10	425621	Jasa kapal bertambat/berlabuh diatas batas max 30 etmal	6.735.060	-
11	425621	Jasa cool room	30.600.000	14.999.950
12	425621	Jasa pembekuan (freezer)	25.500.000	5.000.000
13	425621	Pas masuk motor	14.622.000	16.882.000

14	425621	Pas masuk mobil	10.200.000	14.878.000
15	425621	Pas masuk truck/bus	15.300.000	8.624.000
16	425621	Jasa kebersihan bangunan permanen	15.300.000	10.188.120
17	425621	Jasa kebersihan bangunan semi permanen-		93.600
18	425621	Jasa kebersihan warung/kios	12.699.000	5.423.178
19	425621	Jasa kebersihan kolam kapal > 30 GT	2.655.000	12.715.689
20	425621	Jasa kebersihan kolam kapal non perikanan	7.140.000	4.587.500
21	425151	Jasa forklift	10.200.000	11.500.000
22	425151	Jasa truck crane	35.700.000	38.100.000
23	425151	Jasa mobil dump truck	7.500.000	-
24	425151	Jasa mobil tangki air	36.300.000	42.300.000
25	425151	Jasa kendaraan berpendingin	15.300.000	-
26	425151	Jasa tangki BBM & instalasi	10.710.000	7.600.000
27	425151	Jasa tangki air & instalasi	25.500.000	51.629.000
28	425151	Jasa tpt perbaikan kapal kerusakan ringan	2.550.000	120.000
29	425151	Jasa pekerjaan ringan	13.760.000	21.260.000
30	425151	Jasa pekerjaan sedang	20.400.000	31.320.000
31	425151	Jasa pekerjaan berat	40.800.000	-
32	425151	Jasa penggunaan tanah	4.590.000	11.997.330
33	425151	Jasa pemeliharaan tanah/prasarana	1.042.500	6.169.400
34	425151	Jasa bangunan semi permanen	3.570.000	7.950.600
35	425151	Jasa bangunan permanen	15.300.000	12.263.500
36	425151	Tpt penump brg ruang terbuka beratap	30.600.000	5.270.000
37	425151	Tpt pen brg ruang terbuka tidak beratap	10.914.000	29.320.950
38	425151	Jasa mess ac	5.400.000	5.320.000
39	425151	Jasa ruang rapat ac	3.060.000	1.500.000
Jumlah			661.123.67	619.693.365
			0	

Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2019.

Pada tahun 2019 terjadi penurunan realisasi penerimaan sehingga tidak dapat terlampaunya target penerimaan yang sudah ditentukan setiap tahunnya dari Pemerintah Pusat sehingga tingkat keefektifan tampak menurun menjadi 93.73%. dengan perolehan persentase pada dua tahun terakhir keefektifan lebih dari 100% walaupun tingkat persentase setiap tahunnya menurun, tetapi hanya pada tahun terakhir saja yaitu tahun 2019 tingkat efektifitasnya tidak mencapai 100%, karena pada tahun 2019 ini terdapat beberapa kendala sehingga tidak dapat terjadi penerimaan PNBP, tempat penumpukan barang ruang terbuka tidak beratap yang pada tahun 2017 tidak terdapat target tetapi pada tahun 2018 pemerintah menargetkan sebesar Rp. 30.000.000 dan 2019 terdapat target sebesar Rp.30.600.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 5.270.000 dan terdapat jenis PNBP lainnya yang tidak dapat mencapai target, dan terdapat juga beberapa jenis tarif yang ditargetkan tetapi tidak dapat di realisasikan penerimaan PNBP nya seperti jasa pekerjaan bengkel berat karena memang fasilitasnya tidak tersedia di pelabuhan dan jasa kapal bertambat/labuh diatas batas max 30 etmal yang tidak dapat direalisasikan karena tidak ada kapal jenis tersebut yang masuk ke area kolam Pelabuhan, sebenarnya pada tahun 2017 tidak terdapat tergetnya tetapi pada tahun 2017-2018 tersebut terdapat realisasi penerimaan yang cukup besar dari jenis PNBP tersebut sehingga pada tahun 2019 pemerintah menentukan targetnya tetapi pada kenyataannya di tahun 2019 tidak terdapat realisasi kapal bertambat/labuh diatas batas 30 etmal karena tidak terdapat kapal jenis tersebut yang memasuki area kolam pelabuhan sehingga mempengaruhi target penerimaan pada tahun 2019 dengan tidak dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini lah yang menyebabkan pada tahun 2019 ini tidak terjadi pencapaian target PNBP karena hanya terdapat beberapa jenis tarif

PNBP saja yang dapat mencapai target dan terdapat beberapa yang terdapat target tetapi tidak dapat terealisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2017 – 2018 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adanya peningkatan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari tahun 2017 – 2018 menunjukkan kinerja yang baik, walaupun persentase setiap tahun menurun tetapi pada tahun 2017 – 2018 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak adanya peningkatan walaupun tidak begitu pesat dari persentase tahun 2018 ke persentase tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk tingkat efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, berdasarkan hasil penelitian tahun 2017 berada pada tingkatan yang sangat efektif, begitupun pada tahun 2018 walaupun tingkat efektifitas menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 tingkat efektifitas adanya penurunan yaitu dibawah 100% dikarenakan pada tahun 2019 terjadinya penurunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga target Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dapat tercapai karena pada tahun 2019 dari sebagian banyak jenis penerimaan banyak yang tidak dapat mencapai targetnya, dan juga terdapat beberapa kendala lainnya seperti tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memang sudah ditentukan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak semua tarif yang sudah ditentukan di dalamnya dapat direalisasikan karena keterbatasan fasilitas dan keterbatasan sumberdaya manusia di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang tidak memadai dan lain-lain.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian terdahulu Budi dan Handayani (2019) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Pada penelitian ini Taman Nasional Bali Barat PNBP setiap tahunnya meningkat dan terjadi pelonjakan pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 sudah menerapkan seluruhnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2014 belum sepenuhnya diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 yang baru dimulai pada bulan Juli tahun 2014. Masalah yang terjadi pada penelitian terdahulu sama halnya dengan penelitian penulis, walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 sudah diterapkan tetapi baru pada tahun 2020 menerapkan seluruhnya seperti karcis keluar masuk pelabuhan baru berjalan signifikan pada tahun 2020 akhir, sebenarnya pembayaran karcis masuk sudah berlaku sejak tahun-tahun sebelumnya tetapi masyarakat masih saja menghiraukannya karena tidak ada penjagaan peron karcis di depan area pelabuhan dan sebelumnya belum diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kantor/instansi untuk memberi pengertian kepada nelayan, sehingga pembayaran karcis masuk pada tahun-tahun sebelumnya dihiraukan.

Perbedaan penelitian yang saya bahas dan penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu Budi dan Handayani (2019) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan selalu melampaui dari target yang sudah di atur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 sehingga pada tahun 2012-2016 dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat terbilang sangat efektif. Sedangkan pada penelitian yang sedang saya teliti pada tahun 2019 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dapat melampaui dari target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam setiap tahunnya, karena target setiap tahunnya selalu meningkat dan terdapat juga banyak kendala dari pelayanan jasa kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang diberikan kepada nelayan yang disebabkan terjadi beberapa kerusakan fasilitas pelayanan jasa, dan kendala lainnya yang menyebabkan pada tahun 2019 tingkat efektifitasnya terjadi penurunan efektifitas, dan pada tahun 2017-2019 dapat disimpulkan bahwa pada tiga tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu terbilang efektif karena pada tahun 2019 tingkat efektifitas kurang dari 100% yaitu sebesar 93,73%.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena sudah merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dengan perkiraan sekitar 0-5% setiap tahunnya. Sedangkan untuk pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memang setiap tahunnya meningkat dan dapat melampaui target setiap tahunnya pada tahun 2017 – 2018 dengan peningkatan yang tidak begitu pesat bahkan tingkat efektifitasnya menurun tetapi pada tahun 2019 terjadi beberapa permasalahan yang menyebabkan pada tahun ini tidak dapat mencapai atau bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 salah satu permasalahannya yaitu pada tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat target atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa kapal bertambat/berlabuh diatas batas max 30 etmal tetapi ditahun 2017 terdapat realisasinya karena ada kapal jenis tersebut yang memasuki area kolam pelabuhan sehingga harus adanya pemungutan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat segala macam bentuk kegiatan yang terjadi di area pelabuhan maka termasuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian di tahun 2019 ditetapkan target pertahunnya oleh Pemerintah Pusat dengan target yang tinggi yaitu sebesar Rp. 6.735.060 tetapi pada tahun ini ternyata tidak terdapat kapal jenis tersebut yang memasuki area kolam sehingga tidak terdapat realisasinya. Dan juga terdapat beberapa kerusakan dari beberapa fasilitas yang disediakan oleh Instansi untuk digunakan oleh nelayan, contohnya seperti kerusakan pada beberapa mesin *freezer* yang biasa digunakan oleh nelayan untuk menyimpan ikan-ikannya untuk dijual, karena terdapat kerusakan tersebut sehingga realisasi penerimaan yang dihasilkan dari kastorit tidak maksimal, jasa pekerjaan berat yang memang tidak terdapat fasilitasnya dan adanya keterbatasan sumberdaya manusia yang tidak memadai. Beberapa hal ini lah salah satu penyebab pada tahun 2019 target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dari hasil observasi, wawancara, pengumpulan data maka dapat saya analisis dengan hasil pengamatan analisis seperti berikut:

1. Tingkat keefektifan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan perolehan persentase keefektifan pada dua tahun terakhir 2017 – 2018 terbilang menurun tetapi pada dua tahun tersebut tingkat keefektifan standarisasinya terbilang sangat efektif, tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan tetapi jika dilihat melalui standarisasinya masih terbilang efektif. Berdasarkan standarisasi keseluruhan yang terjadi dari tahun 2017 – 2018 kesimpulannya bahwa dalam tiga tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu masih terbilang efektif.
2. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu setiap tahunnya selalu meningkat sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2017-2018 target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selalu mengalami pencapaian target, tetapi pada tahun 2019 tidak terjadi pencapaian target dikarenakan adanya beberapa kendala sehingga tidak bisa mendapatkan beberapa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hastuti, (2018). *Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol. 01, No. 02, Jurusan Akuntansi Universitas muhammadiyah Buton Baubau.
- <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu/page/2877-struktur-organisasi>.
- https://ppnpalratu.blogspot.com/2009/11/sejarah-ppn-palabuhanratu_22.html
- <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>.

- Karo, dan Datu, (2018). Ipteks Pengendalian Intern Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut, Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, 59 60 Vol. 02, No. 02, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Sharma, (2015). *Analisis Daya Apung Pendapatan Bukan Pajak di India*. *Jurnal Penelitian Internasional*. Volume 5, Edisi 5 (ISSN 2249-7382). Universitas Rajasthan, Jaipur (India).
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung. Alfa Beta Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun, 2003, Tentang Keuangan Negara.
- Yuliyanti, I. N. (2014). *Pengaruh jumlah uang beredar (M2), Tingkat suku bunga SBI, impor, dan cadangan devisa terhadap nilai tukar Rupiah/Dolar Amerika Tahun 2001-2013*. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).